

Problematika Penerapan Kebijakan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 066670 Medan

Yohana Monika Br Tarigan¹ 

¹ Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 20154, Medan

*Corresponding Author: Yohanatarigan73@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 25 November 2023

Revised : November 2023

Accepted : 12 Desember 2023

Available online : 13 Desember 2023

E-ISSN:

P-ISSN:

How to cite:

Huszka, B. (2020). Metaphors of Anger in Contemporary Bahasa Indonesia: A Preliminary Study. *LingPoet: Journal of Linguistics and Literary Research*, 1(1), 26-30.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

ABSTRACT

Pendidikan adalah serangkaian upaya dalam mencerdaskan generasi bangsa agar dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun pendidikan memiliki peranan krusial dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara. Maka dari itu, pembaharuan sistem pendidikan melalui kebijakan kurikulum harus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta observasi langsung. Hasil yang didapatkan adalah adanya problematika dalam penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka seperti kompetensi Sumber Daya Manusia, fasilitas sarana dan prasarana hingga faktor sosial dan ekonomi.

Kata Kunci : pendidikan, kurikulum, problematika, kebijakan

ABSTRAK

Education is a series of efforts to educate the nation's generation so that they can live their lives independently and responsibly. Education has a crucial role in development and achieving state goals. Therefore, updating the education system through curriculum policies must be carried out periodically to adapt to the needs of students. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection was carried out by means of interviews and direct observation. The results obtained were that there were problems in implementing the Independent Curriculum policy, such as Human Resource competencies, facilities and infrastructure and social and economic factors.

Keywords: education, curriculum, problems, policy

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan tujuan negara. Hal tersebut menjadikan pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang krusial bagi masyarakat yang harus diakomodasi oleh negara. Pendidikan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2003 harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Dalam Pasal 3 tertulis bahwa tujuan dari pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. Tujuan ini sejalan dengan tujuan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Desyandri dalam (Susanti, Rahmadona, & Fitria, 2023), “pendidikan merupakan sebuah proses pengajaran untuk terciptanya manusia yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasi dengan menyeluruh”.

Adapun untuk mencapai tujuan diatas, diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur standar dan tata cara dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pendidikan dan pemerintah. Pemerintah selaku pemegang kewenangan berperan dalam menghadirkan

sistem yang dapat mengakomodasi keanekaragaman kondisi masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan pendidikan sebagai salah satu sektor publik haruslah sejalan dengan kebijakan yang tepat sasaran guna mempersiapkan generasi bangsa dalam menghadapi perubahan dan tantangan global di masa yang akan datang. Adapun menurut (Elwijaya, Mairina, & Gistituati, 2021), “kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan”.

Salah satu kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat sistem yang memuat pengaturan mengenai tujuan, isi serta bahan pembelajaran yang dapat dipakaikan dalam proses belajar mengajar. Adapun menurut Bahri (2017) dalam (Arviansyah & Shagena, 2022) kurikulum merupakan perencanaan pendidikan berstruktur yang tidak hanya berfokus pada proses belajar, namun juga untuk membentuk kepribadian serta meningkatkan taraf hidup peserta didik di lingkungan masyarakat. Dalam menghadapi kebutuhan di tengah zaman yang berubah-ubah ini, kurikulum pendidikan di Indonesia sudah mengalami perubahan sebanyak 9 kali semenjak kemerdekaan.

“Seiring perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat, sebuah kurikulum juga akan mengalami fase perubahan dan evaluasi” (Susanti, Rahmadona, & Fitria, 2023) hingga kini pendidikan Indonesia menggunakan Kurikulum Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Februari 2022 melalui Kepmendikbud Ristek No.56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai salah satu bagian dari program Merdeka Belajar. Adapun Kurikulum Merdeka hadir menggantikan Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan selama beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dari konsep besarnya, Kurikulum 2013 lebih menekankan pengembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa, sementara Kurikulum Merdeka lebih mengacu kepada pertumbuhan minat dan bakat para peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek.

Secara spesifik, Kurikulum Merdeka hadir sebagai pemulihan pembelajaran pasca Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan masif pada tata cara pembelajaran. Selain untuk menyempurnakan penerapan Kurikulum 2013, tujuan dari Kurikulum Merdeka dalam penelitian (Susanti, Rahmadona, & Fitria, 2023) adalah “...untuk mempersiapkan unit-unit pelatihan, yang harus berisi kompetensi dan konten agar nantinya akan menjadi acuan bagi para pengajar untuk berpartisipasi pada metode pembelajaran”.

Namun kenyataan di lapangan, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka ini. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyak faktor penghambat yang menjadi problematika kebijakan ini. Hambatan yang dialami sekolah pun beraneka ragam, mulai dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga fasilitasi sekolah yang terbatas. Perbedaan kondisi lingkungan sekitar sekolah juga faktor ekonomi turut mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas problematika yang terjadi dalam penerapan Kurikulum Merdeka secara spesifik di salah satu Sekolah Dasar di Kota Medan.

Tinjauan Pustaka

Menurut (Syahrani dkk, 2022), isu pendidikan di Indonesia terdiri dari belum meratanya sistem pendidikan, masih rendahnya mutu pendidikan pada semua jenjang, banyaknya lulusan pendidikan yang belum siap memasuki kehidupan masyarakat, rendahnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pendidikan, rendahnya pemanfaatan IPTEK, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, dalam (Sibuea, 2017), isu pendidikan di Indonesia terdiri dari biaya pendidikan tidak terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, ketidaksempurnaan kurikulum pendidikan yang membuat metode pengajaran berbeda serta kurangnya kualitas guru dan infrastruktur sekolah yang tentu berpengaruh terhadap kualitas siswa. Tidak hanya itu, kurangnya akses anak terhadap pendidikan dan inkonsistensi kebijakan legislasi juga mempengaruhi pembangunan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan teori diatas, isu yang patut di garis bawahi dalam hal ini adalah kebijakan yang mengatur strategi pembangunan pendidikan yang mengatur sistem pendidikan yang efektif. Adapun sistem pendidikan dalam (Munirah, 2015) haruslah dikelola secara sentralistik dan berlaku di seluruh tanah air. Dalam sistem tersebut, tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, baik siswa, guru maupun karyawan, mengenai persyaratan penerimaannya, jenjang kenaikan pangkatnya bahkan sampai

penilaiannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh pelosok tanah air. Maka dari itu, sistem pendidikan harus dapat disesuaikan dengan kemajemukan lingkungan masyarakat.

Menurut (Setyani, Zuliyana, Rofitrasari, Amelia, & Ahsani, 2021) “Sistem pembelajaran merupakan suatu yang berkaitan dengan pembelajaran buat menciptakan tujuan pembelajaran yang baik. Perihal ini berkaitan dengan sebagian faktor yang menyertai berhasilnya suatu tujuan suatu lembaga pembelajaran, mencakup partisipasi didik, pendidik, kurikulum, serta wali murid”. Maka dari itu, dalam rangka menghadirkan sistem pembelajaran yang baik, pemerintah harus menyediakan sistem pendidikan yang tertuang dalam kurikulum yang berfokus pada pengembangan siswa.

Menurut (Nugraha, 2022), “kurikulum adalah sebagai sebuah rencana dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan”. Untuk menemukan kurikulum yang dapat menyesuaikan kebutuhan pelajar, maka perubahan dan perbaikan pun menjadi suatu hal yang pasti. “Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai suatu konsep yang harus mampu menjawab semua tantangan yang ada di mana kurikulum diterapkan.”

Dengan pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sampailah pada kurikulum terbaru yang dinamakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang mandiri, nyaman, aktif, berkarakter, bermakna dan merdeka untuk mencetak profil pelajar Pancasila (Inayati, 2022). Menurut (Saleh, 2020) dalam (Susanti, Rahmadona, & Fitria, 2023) Kurikulum Merdeka adalah “sistem yang mengeksplor keunggulan dari guru serta siswa untuk kreatif terhadap peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang diaplikasikan berdasarkan laporan penelitian masing-masing sekolah penggerak”.

Berdasarkan kondisi dan teori diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji penerapan Kurikulum Merdeka serta hambatan dan permasalahan dalam prosesnya sebagai respon atas pengembangan kurikulum pembelajaran di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena dilapangan dengan spesifik dan transparan. Dalam (Rusandi & Rusli, 2023), penelitian deskriptif kualitatif membawa peneliti menyelidiki fenomena dan kejadian sekelompok individu untuk memperoleh informasi yang akan diceritakan kembali dalam kronologi deskriptif. Subjek penelitian adalah SD Negeri 066670 Medan, salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Medan Belawan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi di SD Negeri 066670, sementara data sekunder diperoleh melalui artikel ilmiah dari jurnal dan penelitian terdahulu. Adapun perolehan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Kurikulum Merdeka menjadi angin segar dalam dunia pendidikan Indonesia. “Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan kegiatan belajar mengajar intrakurikuler yang beraneka ragam dimana konten akan lebih maksimal supaya peserta didik mempunyai cukup durasi buat menguasai rancangan serta memantapkan kompetensi. Guru mempunyai kebebasan buat memilah bermacam alat serta materi didik alhasil kegiatan belajar mengajar bisa diselaraskan dengan kepentingan belajar serta atensi peserta didik” (Muhartono, Wahyuni, Umiyati, Azhar, & Puspaningrum, 2023). Namun dalam setiap kebijakan pada umumnya memiliki celah ataupun kekurangannya masing-masing. Dalam konteks ini, kebijakan Kurikulum Merdeka masih belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh sekolah disebabkan oleh beberapa hal yang akan dijabarkan di bagian pembahasan ini.

Subjek penelitian ini adalah SD Negeri 066670 Medan Belawan, salah satu Sekolah Dasar di Kota Medan. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari sekolah ini menggunakan Kurikulum 2013. Perlu diketahui bahwa dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) terdapat tiga tahapan atau level yang dapat dilaksanakan oleh sekolah. Pada tahap yang pertama, Mandiri Belajar. Untuk sekolah yang belum siap dalam mengimplementasikan Kurikulum Mereka dapat memilih opsi ini dengan mempelajari penggunaan media

yang ada, seperti *platform* Merdeka Belajar. Pada level kedua yakni Mandiri Berubah, opsi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah yang adaptif dan siap terhadap perubahan. Dan terakhir, level Mandiri Berbagi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah yang sudah siap menjalankan Kurikulum Merdeka. Pada opsi ini, sekolah dapat secara leluasa memakai perangkat ajar yang tersedia maupun mengembangkannya sendiri. Level Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi dapat diterapkan di tingkat PAUD, kelas 1,4, 7 dan 10. Berdasarkan opsi diatas, Kemendikbud memberikan kebebasan kepada sekolah dalam hal penerapan Kurikulum Merdeka.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn dikemukakan bahwa dalam mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan harus didasarkan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan yang mempengaruhi variabel keberhasilan penerapan kurikulum adalah pemerintah, guru, stakeholder sekolah dan juga orang tua murid. Kunci keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kompetensi dan kolaborasi pihak terkait. Adapun permasalahan yang dihadapi SD Negeri 066670 Medan dalam IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) ialah Sumber Daya Manusia, fasilitas, kondisi sosial ekonomi serta sosialisasi yang kurang merata dari pemerintah.

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dari Sumber Daya Manusia pelaksana mengambil peran besar dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Guru merupakan aktor penting dalam penerapan kurikulum ini. Kompetensi guru, kemampuan guru dalam menghadirkan pembelajaran yang merdeka, kreatif dan inovatif bagi siswa menjadi modal utama sekolah. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa dalam Kurikulum Merdeka, guru sebagai fasilitator bertugas menghadirkan inovasi dan pembelajaran terdiferensiasi untuk menjawab kebutuhan peserta didik dan menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Untuk menjalankan Kurikulum Merdeka diperlukan “kompetensi guru pada tingkat manapun, untuk menerjemahkan kompetensi dasar yang diamanatkan pada kurikulum” (Susanti, Rahmadona, & Fitria, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru, sebagian besar guru menyetujui bahwa kompetensi guru merupakan salah satu kunci efektivitas pembelajaran. Namun kemampuan guru di SD Negeri 066670 dalam menghadirkan inovasi pembelajaran dapat dikatakan belum optimal. Seperti yang dikatakan oleh Mindo, wali kelas 6B bahwa kompetensi guru dalam berkreasi di dalam kelas masih dikatakan kurang. Begitu pula adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Pernyataan tersebut didukung oleh Tuminiati, wali kelas 5 yang membenarkan kurangnya tenaga IT di sekolah tersebut.

Pemahaman stakeholder sekolah akan kebijakan yang ada juga menjadi hal penting yang mempengaruhi penerapannya. Menurut (Muhartono, Wahyuni, Umiyati, Azhar, & Puspaningrum, 2023), “kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan dapat dipengaruhi oleh tiga jenis elemen respon, pertama terdiri dari pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman kebijakan (*understanding and understanding*), dan kedua, arah respon. penerimaan, netralitas atau penolakan (*acceptance, neutrality and rejection*) dan ketiga intensitas terhadap kebijakan”.

Berdasarkan teori diatas, fakta dilapangan menunjukkan bahwa guru, kepala sekolah dan karyawan sudah memiliki kesadaran akan eksistensi kurikulum merdeka, namun masih belum sampai pada tahap pemahaman dan pendalaman. Guru hanya sekedar mengetahui sebatas pengertian Kurikulum Merdeka. Para guru mengakui mendapatkan informasi mengenai kurikulum ini sebatas melalui internet dan sosial media. Sikap masyarakat sekolah akan kurikulum ini cenderung netral, namun tidak dapat menjalankan opsi level pertama IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) dikarenakan pemahaman yang minim.

Berdasarkan hasil wawancara, para guru mengalami sedikit kebingungan dalam peralihan kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Menurut Tuminiati, wali kelas 5 para guru masih belum dapat memutuskan untuk beralih ke Kurikulum Merdeka dikarenakan masih dalam tahap optimalisasi Kurikulum 2013. Ditambah dengan keadaan pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan sekolah harus melakukan pemulihan pembelajaran.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun keberadaan fasilitas di sekolah tentu akan menunjang kegiatan akademik dan nonakademik siswa. Dalam (Nasrudin & Maryadi, 2018), sarana pendidikan adalah peralatan yang digunakan secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Sementara prasarana pendidikan adalah perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Namun di SD Negeri 066670 Medan, kuantitas dan kualitas fasilitas masih dapat dikatakan belum optimal. Gedung sekolah sudah dilengkapi dengan ruang kelas yang diisi dengan meja, kursi, papan tulis dan juga lemari. Selain itu terdapat juga ruang guru, perpustakaan serta ruang UKS. Kendati demikian, fasilitas di sebagian besar kelas sudah tergolong berusia lama. Selain itu, media ajar serta alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran juga masih minim. Sekolah ini juga belum memiliki ruang ibadah serta laboratorium sekolah. Untuk aktifitas fisik luar ruangan seperti pelajaran Penjaskes sekolah juga masih belum memiliki alat untuk praktek olahraga. Keadaan ini tentu membatasi kebebasan siswa untuk mengasah minat serta mengekspresikan diri sehingga pengamalan Merdeka Belajar sulit untuk dioptimalkan.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Tidak hanya faktor internal, namun penghambat juga dapat datang dari faktor eksternal. Agar kebijakan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan lingkungan eksternal yang suportif dan kondusif. Dalam hal ini, orang tua murid menjadi salah satu faktor eksternal yang memegang peranan penting dalam kegiatan belajar siswa. Orang tua murid diharapkan dapat terbuka akan perubahan kurikulum dan dapat berkolaborasi dengan guru di sekolah. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan guru di sekolah, didapati bahwa lingkungan sekitar siswa masih sangat awam dengan adanya pembelajaran kreatif yang terkadang mengharuskan siswa membawa bahan praktek dari rumah untuk keperluan pembelajaran berbasis proyek. Hal tersebut dipengaruhi oleh minimnya kesadaran akan Kurikulum Merdeka serta kondisi ekonomi orang tua murid. Dari hasil wawancara dengan Adik, wali kelas 3 diketahui bahwa orangtua siswa masih merasa keberatan dengan adanya kegiatan pembelajaran yang memerlukan dana seperti mencetak (*print*) dan lain lain.

4. Sosialisasi dan Pelatihan

Kurangnya kesiapan para pendidik menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kebingungan yang terjadi di tengah-tengah para guru. Pada kurikulum yang berlaku sebelumnya, sosialisasi dan kampanye cenderung dilakukan secara tersentralisasi oleh pemerintah. Namun pada Kurikulum Merdeka, guru dapat belajar secara mandiri dan mendapatkan informasi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), webinar, panduan IKM serta pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan pernyataan para guru yang menyatakan masih menunggu sosialisasi dan pelatihan dari dinas terkait. Menurut para guru di SD Negeri 066670 Medan, mereka tidak dapat menerapkan IKM karena belum adanya pengetahuan lebih lanjut yang semestinya didapat melalui sosialisasi langsung. Hal ini diakibatkan kurangnya promosi dan penyebaran informasi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang telah dituangkan dalam Kepmendikbud Ristek No.56 tahun 2022 di SD Negeri 066670 Medan terdapat problematika sebagai berikut:

- Kurang maksimalnya peranan guru sebagai SDM pendidik di sekolah dalam menghadirkan pembelajaran berbasis proyek yang inovatif. Hal ini disebabkan kompetensi guru yang masih harus ditingkatkan.
- Keterbatasan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di SD Negeri 066670 yang menghambat siswa dalam berkreasi dan mengekspresikan diri, mulai dari kurangnya alat peraga hingga fasilitas meja dan kursi di beberapa kelas.

- Lingkungan sekitar siswa yang masih sangat awam akan kebijakan kurikulum terbaru yang menyebabkan sulitnya menciptakan kolaborasi antara guru dan wali murid, serta kondisi ekonomi sebagian wali murid.
- Sosialisasi dan kampanye terkait Kurikulum Merdeka yang masih kurang gencar menyebabkan kurangnya informasi bagi guru di sebagian sekolah akan PMM, webinar, panduan serta pemberdayaan yang disediakan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arviansyah, M. R., & Shagena, A. (2022). Efektivitas dan Peran Guru dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 41.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 68.
- Inayati, U. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Abad-21. *2st ICIE: International Conference on Islamic Education*, 296.
- Muhartono, D. S., Wahyuni, S., Umiyati, S., Azhar, A. W., & Puspaningrum, I. I. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Rangka Peningkatan Hasil Belajar. *PUBLICIANA*, 5.
- Munirah. (2015). SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: Antara Keinginan dan Realita. *JURNAL AULADUNA*, 235.
- Nasrudin, & Maryadi. (2018). MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN DI SD. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 16.
- Nugraha, T. S. (2022). Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Krisis Pendidikan. *Jurnal UPI*, 254.
- Rusandi, & Rusli, M. (2023). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2.
- Setyani, Zuliyana, F., Rofitrasari, Amelia, N., & Ahsani, E. L. (2021). Analisis Sistem Pendidikan Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL): Perspektif Guru. *Jurnal PGSD*, 70-71.
- Sibuea, H. Y. (2017). EDUCATION SYSTEM REFORM IN INDONESIA: PROGRESS AND CHALLENGES. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 152.
- Susanti, M., Rahmadona, T., & Fitria, Y. (2023). Perbedaan Penilaian Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *JURNAL BASICEDU*, 342.
- Syakhrani, A. W., Norman, Ramadan, R. S., & Rahmadani. (2022). SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA INDONESIA. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 393